

Sumber daya manusia

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya dan perlengkapan yang dimilikinya sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam menjalankan roda organisasi, Dinas P3AP2 dan KB didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 37 pegawai Negeri Sipil, 1 orang PTT dan 14 orang THL dengan perincian sebagai berikut :

Unit Organisasi	S2		S1		D3/D4		D1		SMA/Se derajat		SMP/SD		Jumlah Keseluruhan	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kepala DP3AP2 &KB	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sekretariat	2	2	2	4	-	-	-	-	1	1	2	-	7	7
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	2	-	4	-	-	-	-	1	1	-	-	1	7
Bidang Pengendalian Penduduk dan KS	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	3
Bid. Keluarga Berencana	-	-	4	-	-	1	-	-	2	-	-	-	7	1
Jml pegawai berdasar jenis kelamin	5	7	7	8	1	2	-	-	4	3	2	-	18	19
Jml pegawai berdasar jenjang pendidikan	12		15		3		-		7		2		37	

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, tingkat pendidikan pegawai Dinas P3AP2 dan KB yang paling banyak adalah pendidikan sarjana/S1 yaitu sebanyak 40,54% yang terdiri dari 18 karyawan laki-laki dan 19 karyawan perempuan hal ini menunjukkan bahwa telah ada kesetaraan gender dalam komposisi pegawai pada Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal. Dengan tingkat pendidikan formal karyawan Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal yang sebagian besar merupakan sarjana diharapkan menjadi modal dasar untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penataan dan penempatan pegawai pada tiap bidang adalah kesesuaian antara rasio jumlah karyawan dengan beban kerja tiap bidang, dan kualifikasi Sumber Daya Manusia dengan bidang kerja. Hal ini dimaksudkan agar dalam penempatan pegawai tidak terjadi kesalahan akibat ketidaksesuaian antara penempatan pegawai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*) serta ketidaksesuaian kualifikasi sumber daya manusia dengan beban kerja tiap bidang sehingga akan berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja pegawai dan pencapaian visi misi OPD.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, kekurangan jumlah pegawai sebanyak 19 orang dari total kebutuhan yaitu 56 orang. Di samping kekurangan pegawai dari segi kuantitas tersebut, juga masih terdapat kekurangan secara kualitas sebanyak $\pm 40\%$ (empat puluh per seratus) yang perlu terus ditingkatkan kemampuannya baik kompetensi maupun kinerjanya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Ada pun berdasarkan golongan, jumlah pegawai di Dinas P3AP2 dan KB :

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	2	-	2
2	Golongan II	2	1	5
3	Golongan III	9	14	23
4	Golongan IV	3	4	7

Lebih terperinci dari data di atas bahwa pegawai Golongan I dan II, berkedudukan sebagai pelaksana/staf, sedangkan untuk karyawan Golongan III berkedudukan sebagai Pejabat Eselon III 1 orang dan Eselon IV 8 orang dan 14 orang berkedudukan sebagai pelaksana/staf. Adapun pelaksana/staf dengan Pangkat Golongan III sebanyak 12 orang merupakan pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana S1 dari beberapa disiplin ilmu. Jumlah karyawan dengan golongan I dan II relatif cukup kecil hanya sebesar 18,92%. Mengingat pegawai golongan I dan II bertugas di bidang administrasi perkantoran dan lapangan, sehingga ke depan perlu di rencanakan adanya penambahan kebutuhan jumlah pegawai berkriteria golongan II.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam keluarga berencana, pemerintah telah membuat kebijakan tentang tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dimana Penyuluh Keluarga Berencana ini adalah kegiatan penyampaian informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan prilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Kedudukan PLKB/PKB dalam organisasi BKKBN merupakan petugas lapangan yang berkedudukan di Kecamatan dengan wilayah tugas di Desa/Kelurahan atau disebut dengan wilayah kerja PLKB/PKB, dan bertanggung jawab langsung kepada kepala OPD KB kabupaten dan atau kepala OPD KB kota, sedangkan secara administrasi berada di bawah pengawasan PLKB Kecamatan dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada kepala Desa/Kelurahan.

Tenaga fungsional penyuluh KB di Kabupaten Tegal sampai dengan akhir bulan Mei 2021 tercatat berjumlah 69 orang dan tersebar di 18 kecamatan. Dengan demikian rasio penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) sebesar 4,15 yang artinya 1 orang PLKB/PKB membina 4 – 5 desa. Kondisi ini menyebabkan frekuensi penyuluhan dan pembinaan KB sangat terbatas. Terbatasnya jumlah Penyuluh Keluarga Berencana tentunya akan menimbulkan berbagai masalah dan tantangan yang sebelumnya tidak pernah dihadapi, seperti bertambahnya jumlah desa binaan yang sebelumnya hanya 1 desa menjadi 4 - 5 desa. Sangat sulit bagi Penyuluh Keluarga Berencana untuk menghindari kejadian dan fakta yang terjadi di wilayah tugasnya, yang sebelumnya telah mapan dari sisi sistem kerja, kemitraan, pencatatan dan pelaporannya kemudian sekarang dihadapkan pada berbagai problema yang sangat berat seperti halnya, beban tugas yang terlalu banyak, institusi masyarakat yang tidak loyal lagi, serta kurangnya dukungan dan perhatian kepala desa/lurah.

Jumlah Penyuluh KB dan desa binaan di Kabupaten Tegal dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Penyuluh	Jumlah desa	Rasio PLKB
1	Margasari	3	13	4,33
2	Bumijawa	4	18	4,50
3	Bojong	4	17	4,25
4	Balapulang	6	20	3,33
5	Pagerbarang	4	13	3,25
6	Lebaksiu	3	15	5,00
7	Jatinegara	3	17	5,67
8	Kedungbanteng	3	10	3,33
9	Pangkah	5	23	4,60
10	Slawi	4	10	2,50
11	Dukuhwaru	3	10	3,33
12	Adiwerna	5	21	4,20
13	Talang	4	19	4,75
14	Dukuhturi	5	18	3,60

15	Tarub	4	20	5,00
16	Kramat	4	20	5,00
17	Suradadi	2	11	5,50
18	Warureja	3	12	4,00
Jumlah		67	287	4,15

Berdasar tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah PLKB di Kabupaten Tegal sangat kurang. Mengingat tugas pokok dan fungsi dari PLKB yang sangat penting, ke depan perlu di rencanakan dan diusulkan penambahan kebutuhan jumlah PLKB melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, dan apabila memungkinkan mengadvokasi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan melalui surat keputusan pengangkatan Non PNS sebagai PLKB daerah, dan tetap melakukan kebijakan pelatihan dan pendidikan kepada pengganti PNS tenaga penyuluh keluarga berencana yang telah diputuskan dalam kebijakan daerah tersebut.

Ketercukupan jumlah pegawai tidak akan memperoleh hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam penyelesaian tugas. Dari awal berdirinya perangkat daerah pada Tahun 2008 sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat terbatas, namun demikian penyelesaian tugas menjadikan prioritas yang harus dilaksanakan walaupun dengan sarana dan prasarana yang serba minimal. Dengan berjalannya waktu tahun demi tahun terdapat peningkatan anggaran yang dimanfaatkan untuk pengadaan sarana prasarana yang sangat urgen untuk segera dipenuhi diantaranya personal komputer (PC), laptop/notebook, printer, LCD, kendaraan dinas operasional, meja dan kursi kerja, meja rapat, filling cabinet dan lemari besi. Namun keseluruhan pengadaan dan penyediaan sarana prasarana kerja tersebut masih belum mencukupi dan masih ada

sarana prasarana yang perlu diperbarui mengingat usia dan perkembangan teknologi.